

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK TANPA HAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI TANJUNG PINANG

Oleh
M. Reza Irawan Meliala
NIM. 160574201028

Abstrak

Salah satu perbuatan yang melanggar hukum terkait dengan hal pemenuhan kebutuhan yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yang dewasa ini sedang berkembang dan sangat marak terjadi adalah tindak pidana pencurian listrik. Sanksi yang diberikan oleh pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) seharusnya berupa sanksi pidana berlandaskan pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, namun pada penerapan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggunakan sanksi administratif yang berada pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penggunaan listrik tanpa hak dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan serta efektifitas dari penerapan sanksi administratif yang di berikan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dan teknik pengumpulan data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pihak PT.PLN (PERSERO) memberikan mandat serta wewenang kepada petugas P2TL untuk melakukan penindakan terhadap temuan yang ada di lapangan. Dikarenakan proses penegakan hukum yang panjang ditakutkan akan menimbulkan penyelesaian kasus yang berkepanjangan serta kerugian yang lebih banyak, sehingga pihak PT.PLN (PERSERO) memilih untuk menyelesaikan perkara secara mediasi penal serta memberikan sanksi berupa ganti rugi kepada pelaku pencurian. Penerapan sanksi administratif yang di terapkan oleh pihak PT.PLN (Persero) dinilai kurang efektif sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian listrik serta kurangnya Kerjasama antara pihak PT.PLN (PERSERO) dalam kasus ini petugas P2TL dengan Kepolisian selaku Lembaga penegak hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencurian Listrik, Penerapan Sanksi

**ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW ON THE USE OF ELECTRICITY
WITHOUT RIGHTS ASSOCIATED WITH THE LAW CONCERNING
ELECTRICITY IN TANJUNG PINANG**

**By:
M. Reza Irawan Meliala
NIM. 160574201028**

Abstract

One of the unlawful acts related to fulfilling needs that often occurs in society is the crime of theft. The crime of theft that is currently developing and very widespread is the crime of electricity theft. The sanctions given by the State Electricity Company (PLN) should be in the form of criminal sanctions based on Article 51 paragraph (3) of Law number 30 of 2009 concerning Electricity, but in the implementation of the State Electricity Company (PLN) using administrative sanctions which are in Article 48 paragraph (1) Law number 30 of 2009 concerning Electricity. The purpose of this study is to find out how the enforcement of criminal law against the use of electricity without rights is related to Law number 30 of 2009 concerning electricity and the effectiveness of the application of administrative sanctions given. This study uses empirical normative methods and qualitative data collection techniques. Based on the results of the research, it is known that PT PLN (PERSERO) gave the mandate and authority to P2TL officers to take action on findings in the field. Due to the fear that the lengthy law enforcement process will lead to prolonged case resolution and more losses, PT. PLN (PERSERO) chooses to settle cases through penal mediation and impose sanctions in the form of compensation to the perpetrators of theft. The application of administrative sanctions applied by PT. PLN (Persero) is considered to be ineffective so that it does not provide a deterrent effect on the perpetrators of the crime of electricity theft and the lack of cooperation between PT. PLN (PERSERO) in this case P2TL officers and the Police as an enforcement agency law.

Keywords: Law Enforcement, Electricity Theft, Enforcement of Sanctions